

## GANDRUNG AS A POLITICAL COMMUNICATION TOOL IN BANYUWANGI (A Study of Antonio Gramsci's Hegemony)

### GANDRUNG SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI POLITIK DI BANYUWANGI (Suatu Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)

Mahfud<sup>1a\*</sup>, Andrik Purwasito<sup>2b</sup>, Wardo<sup>3c</sup>, Wakit Abdullah Rais<sup>4d</sup>

<sup>1</sup>Graduate School of Universitas Sebelas Maret, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

<sup>234</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>a</sup>[mahfud@student.uns.ac.id](mailto:mahfud@student.uns.ac.id), [mahfuduntag2@gmail.com](mailto:mahfuduntag2@gmail.com)

<sup>b</sup>[andrikpurwasito@staff.uns.ac.id](mailto:andrikpurwasito@staff.uns.ac.id)

<sup>c</sup>[warto2013@staff.uns.ac.id](mailto:warto2013@staff.uns.ac.id)

<sup>d</sup>[wakit.a.rais\\_1460@staff.uns.ac.id](mailto:wakit.a.rais_1460@staff.uns.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[mahfuduntag2@gmail.com](mailto:mahfuduntag2@gmail.com)

**How to Cite:** miskawi. (2020). Gandrung Sebagai Alat Komunikasi Politik Di Banyuwangi (Suatu Kajian Hegemoni Antonio Gramsci) doi: 10.36526/js.v3i2.

<p>Received : 30-03-2023                  Revised : 06-04-2023                  Accepted : 30-06-2023  <b>Keywords:</b>                  Passion,                  communication,                  and politics</p>	<p><b>Abstract</b>                  Gandrung is one of the oldest forms of performing arts in Banyuwangi. Gandrung becomes a symbol of political communication through culture. This is clearly seen during the democratic party period. The purpose of this research is to reveal and criticize Gandrung which is used as a medium of political communication by political actors in Banyuwangi. The form of this research is descriptive qualitative. The theory used is Gramsci's hegemony. Data collection techniques using interviews, observation, and content analysis. The data analysis technique used in this study is an interactive analysis. The results of the study show that the high creativity of the people of Banyuwangi in folk art is recognized by the local government. This has become a loophole for political actors in Banyuwangi to insert political messages into Gandrung art performances. Thus, these political messages can be easily accepted by the public. This proves that if Gandrung's art is studied using Gramsci's theory, it shows that Gandrung is totally hegemony. Total hegemony is characterized by close to total mass affiliation. Society shows a strong degree of moral and intellectual unity, which is evident from the organic relationship between the government and the governed. This relationship is not colored by contradictions and antagonisms either socially or ethically.</p>
---	---

### PENDAHULUAN

Gandrung adalah salah satu wujud seni pertunjukan yang paling tua di Banyuwangi. Gandrung berkembang dimulai dari tahun 1700an. Pada awal kemunculannya, Gandrung berfungsi menjadi alat perjuangan rakyat Blambangan memberontak pada penjajah (Srintil, 2007:13). Pentas Gandrung dulunya disiasati menjadi sebuah kedok oleh para pejuang Blambangan untuk mendistribusikan pesan dari Bupati Blambangan yaitu untuk mengobarkan semangat juang untuk melawan dan mengumpulkan peralatan logistik. Peran Gandrung adalah menjadi mata-mata kaum gerilyawan dan menebarkan informasi-informasi secara simbolik di pedalaman yang terbuang oleh Belanda dalam perang Puputan Bayu pada tahun 1771-1772. Tari Gandrung disajikan dengan cara berkeliling dari wilayah satu, ke wilayah lainnya dengan parade musik yang sederhana. Gandrung biasanya menari dengan satu instrumen dari angklung, angklung Banyuwangi digunakan sebagai pengganti biola (Wolbers, 2014:415).

Setelah itu, terdapat pembukaan lahan di wilayah Blambangan yang sekarang menjadi Banyuwangi. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya formasi sosial. Semenjak itu, semua aspek di Banyuwangi turut berubah, termasuk tari Gandrung yang ikut andil beradaptasi pada dinamika

tersebut. Akibatnya, rakyat Banyuwangi menjadi heterogen dan majemuk. Hal tersebut memicu Gandrung berubah pakemnya dari yang semula tari tontonan menjadi tari pergaulan. Terdapat akulturasi budaya yang berupa masuknya lagu Jawa dan Bali yang mulai digunakan dalam tari Gandrung (Prasetyo et al., 2018). Dengan kondisi yang sedemikian rupa, Gandrung mempunyai peran sebagai wadah hiburan daripada perjuangan masyarakat Osing yang merupakan penduduk asli Banyuwangi. Lebih lanjut, kesenian tari Gandrung mulai dipentaskan pada siang hari sebagai tarian penyambut tamu-tamu terhormat (Dianto, 2017).

Pada tahun 1965, tari Gandrung seringkali menerima undangan untuk menghibur di acara partai politik, dan kerap kali di Partai Komunis Indonesia (PKI). Kondisi inilah yang mengakibatkan Gandrung diseret dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Semua atribut dari Gandrung ditandai menjadi PKI, entah itu lagu, maupun tariannya tidak boleh dinyanyikan dan dipertunjukkan kembali. Hal itu menyebabkan Gandrung vakum selama kurang lebih enam tahun.

Pada masa Orde Baru, Gandrung kembali menjadi 'alat propaganda politik' dan merupakan bagian dari program sosialisasi Dinas Penerangan (Latifa, 2020). Tujuan program ini adalah tari Gandrung masuk menjadi kebijakan baru untuk pariwisata dalam program pemerintah. Pada saat itu, ada perubahan dalam tari Gandrung yang berupa masuknya lagu Arab, Cina, dan India. Hal tersebut merupakan "pesanan" masyarakat untuk mengubah *image negative* Gandrung. Agama dan adat-istiadat ialah dua hal yang saling bertautan, selain itu juga saling mempengaruhi. Tidak hanya itu saja, berubahnya penari Gandrung yang semula dari laki-laki menjadi perempuan dan tata busana juga berkaitan dengan agama. Perubahan tersebut agar menghilangkan stereotip Gandrung yang kerap dilabeli "erotis dan terlalu terbuka." Unsur musik juga ikut berubah, dikarenakan musik adalah alat komunikatif yang ditemukan untuk memperkuat identitas dan kekompakan kelompok dalam sebuah pertunjukan seni (Tekman & Hortacsu, 2002). Dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa, para aktor politik tidak kehabisan ide untuk menempatkan Gandrung supaya tetap dapat diterima oleh semua kalangan.

Gandrung menjadi simbol komunikasi politik yang dilakukan oleh para aktor politik di Banyuwangi melalui kebudayaan. Menurut (Purwasito, 2015) apapun yang digunakan, dapat dikonsumsi dan dikerjakan, benda apapun yang diproduksi, adalah penanda komunikasi. Proses komunikasi berada dalam sistem simbolis. Jadi, Gandrung sebagai media kampanye adalah bentuk komunikasi politik. Gandrung memiliki penampilan yang mempesona dan sebagai media komunikasi politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah daerah juga memasukkan Gandrung sebagai strategi untuk membentuk budaya dominan yang unik sebagai ikon daerah. Di era modern ini, Gandrung dipakai sebagai alat promosi pariwisata nasional dan internasional melalui gelaran festival yang tujuan akhirnya sebenarnya adalah upaya melegitimasi kekuasaan.

Suatu program politik ini mempengaruhi segi perekonomian dan pariwisata di Banyuwangi (Subari & Widiyanto, 2020). Bagi birokrasi dan pemerintah daerah, pemanfaatan Gandrung dihadirkan menjadi objek unik dan eksotik yang mempunyai potensi politik dan ekonomi. Sebagian besar pemimpin Banyuwangi telah mencari perhatian dan kepedulian terhadap penggunaan budaya sejak tahun 1965, meskipun dalam derajat yang berbeda-beda. Penting untuk ditegaskan bahwa, upaya ini tidak hanya tentang pengembangan seni dan budaya Ansicher, tetapi juga merupakan bagian dari bentuk ekspresi pribadi masyarakat untuk mempengaruhi dukungan dan legitimasi politik budaya masyarakat Banyuwangi (Cahyadi, 2019).

Bupati Samsul Hadi berhasil menggunakan Gandrung menjadi kekuatan diskursif yang mempunyai nilai perjuangan bagi rakyat Banyuwangi. Ketika identitas Osing ditemukan, kebijakan politisasi Gandrung dalam konteks penggunaan ekspresi identitas ini meliputi empat relasi kekuasaan yakni, birokrasi kekuasaan politik, tradisi budaya, pasar modal, dan agama khususnya Islam (Cossu, 2021). Hubungan antara kekuatan-kekuatan ini terjadi dalam ruang yang dinamis dan cenderung tidak stabil dengan agendanya masing-masing. Kesenian Gandrung menjadi aset kapitalistik hegemoni bagi siapa saja yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya (Powell, 2011).

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk menjabarkan dan menganalisa bagaimana

masyarakat kapitalis modern diorganisir, atau diorganisasikan pada masa lalu dan masa kini. Gramsci juga merujuk pada situasi sosial-politik yang dalam terminologinya disebut 'momen' dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang (Carnoy, 1984:65). Dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perorangan. Pengaruh dari 'spirit' ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari intelektual. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator. Hal ini mau tidak mau, menjadikan seni dan budaya lokal sebagai elemen terpenting yang dimasukkan banyak pihak ke dalam kekuatan politik praktis daerah. Berbagai strategi sering digunakan untuk menggambarkan elit politik penguasa lokal, yang eksekutif ataupun legislatif. Politik budaya menjadi tanggung bagi penguasa lokal untuk berusaha menyelaraskan diri dengan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok etnis, seni, dan budaya yang benar-benar buatan. Lalu, program budaya yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian budaya daerah tidak dapat melepaskan diri dari tujuan politik dan ekonomi kekuatan lokal, yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan serta pemeliharaan budaya (Panjaitan & Siburian, 2020).

Gandrung digunakan sebagai alat/media politik oleh banyak pihak untuk menghegemoni kekuatan politiknya. Ini terlihat jelas ketika masa-masa pesta demokrasi, banyak sekali para politisi yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota dewan, pemimpin daerah, bahkan pemilihan kepala desa memilih menggandeng Gandrung sebagai media kampanye untuk mendapatkan simpati dan suara masyarakat. Dengan fokus pada perspektif tersebut, kami memiliki posisi akademik yang berbeda dengan peneliti lain yang memiliki topik yang sama tentang Gandrung. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada budaya Gandrung dan permasalahannya serta penggunaan Gandrung dalam kaitannya dengan identitas etnis.

Penelitian pertama dilakukan oleh KP Desantara (2007) dengan judul "Penari Gandrung dan Gerak Sosial Gandrung Banyuwangi" merupakan penelitian yang menjabarkan Gandrung adalah kesenian pertunjukan rakyat, yang diartikan oleh generasi penerusnya menjadi falsafah hidup. Penelitian kedua dari Raharjo (2016) dengan judul "Dinamika Kesenian Gandrung di Banyuwangi 1950-2013." Kajian ini menyelidiki sampai sejauh mana hubungan tari Gandrung dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat Banyuwangi dari tahun 1950-2013. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dianto (2017) yang berjudul "Isun Hang Gandrung" memberikan analisis mengenai semiotik makna Gandrung. Keempat, penelitian oleh Mursidi (2018) tentang "Gandrung Seni Pertunjukan di Banyuwangi." Penelitian tersebut meneliti mengenai perkembangan tari Gandrung yang menjadi salah satu seni tari tradisional yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kelima, oleh Pakarti et al., (2020) tentang "Relasi Kuasa dalam Perubahan Seni Tari Gandrung di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi." Penelitian ini membahas perubahan tarian Gandrung dikarenakan latar belakang tokoh agamawan (khususnya Islam) yang melihat tarian Gandrung dinilai terlalu erotis dan terbuka.

Tari Gandrung menjadi objek yang sudah banyak diteliti, namun belum ada yang mencoba mengungkap bagaimana Gandrung Banyuwangi ini ditarik digunakan sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh para aktor politik di Banyuwangi. Gandrung sudah merupakan resistensi dan menjadi representasi identitas masyarakat Banyuwangi. Atmosfer sosio-kultural rakyat Banyuwangi yang menjadikan Gandrung sebagai nilai seni dan budaya Nusantara yang sudah sepatutnya terus-menerus diteliti dari berbagai sudut. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berbeda, dengan melakukan kajian penelitian tentang Gandrung sebagai alat komunikasi politik di Banyuwangi.

### **Komunikasi Politik**

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan nonverbal. Komunikasi terjadi di setiap ranah kehidupan, seperti politik. Komunikasi politik merupakan suatu proses komunikasi yang

bertujuan untuk memodifikasi pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan tindakan publik berkaitan oleh isu-isu politik (Swanson & Nimmo, 1990:9; Ispandriarno, 2014:13).

Pola komunikasi politik terjadi secara *top-down* hingga *bottom-up*. Maksud dari *top-down* adalah dimulai dari struktur-struktur politik dari rakyat. Lalu *bottom-up*, maksudnya ialah dari masyarakat untuk elit politik, terlebih-lebih dengan hadirnya media baru saat ini. Tujuan dari ini semua yaitu untuk mempengaruhi proses dan kebijakan politik pada lembaga-lembaga politik yang ada. Beberapa fungsi dari komunikasi politik menurut McNair (dalam Cangara 2009:39) ada dua fungsi dasar. Fungsi pertama adalah membagikan informasi pada rakyat apa yang sedang terjadi di lingkungannya. Fungsi kedua adalah media komunikasi bersifat mengawasi kejadian apa saja. Pada negara yang bersifat demokratis, media politik memiliki fungsi menjadi saluran advokasi yang dapat mendorong supaya program lembaga politik bisa diberikan ke media massa.

Komunikasi memiliki lima elemen penting yaitu, komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Menurut (Purwasito, 2015) apapun yang digunakan, dikonsumsi, dan dikerjakan, benda apapun yang diproduksi, adalah simbol dari komunikasi. Proses komunikasi berada dalam sistem simbolis. Jadi, Gandrung dapat menjadi simbol komunikasi politik melalui kebudayaan. Pada mulanya, Gandrung difungsikan menjadi sarana komunikasi para gerilyawan laskar Blambangan untuk dapat mengetahui kekuatan musuh (Anoegrajekti & Macaryus, 2018). Gandrung dijadikan sebagai ajang berkumpulnya para pejuang sekaligus pusat informasi dan pembangkit semangat para pejuang, hal tersebut disampaikan melalui gendhing-gendhing yang dibawakannya (Dariharto, 2009:10). Setelah masa kolonial berakhir, Gandrung dialihfungsikan sebagai media kampanye, yang merupakan suatu bentuk komunikasi politik.

Kesenian Tari Gandrung menjadi sebuah sistem yang ikut turut andil dalam membentuk sosok 'budaya.' Kesenian sebagai bagian dari proses dialektika yang berjalan mengarah ke sebuah sintesa budaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa seni menjadi sebuah sistem budaya yang dimaksud, seni yaitu bagian dari proses dialektika budaya yang menyebar, berlangsung, dan bergantung pada sistem kekuasaan politik yang melingkupinya.

### Hegemoni Gramsci

Menampilkan produk budaya Gandrung yang digunakan untuk kepentingan para agen yang terlibat, dengan kata lain, merupakan cara yang tepat untuk menegosiasikan posisi hegemoni rezim ataupun agen yang lain mengikuti perspektif Gramscian di tengah masyarakat Banyuwangi. Dengan seolah memberikan berbagai hiburan Gandrung, festival, dan parade yang menghibur kepada masyarakat Banyuwangi, dimana sebagian besar dari mereka memandang bahwa pemerintah dan struktur yang lain sedang serius dalam mempromosikan sekaligus memberdayakan potensi lokalnya. Namun, sebenarnya itu semua adalah upaya para agen agar masyarakat Banyuwangi memberikan persetujuan politik terhadap apa yang akan dilakukannya.

Hegemoni berarti diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual (Hendarto, 1993:73). Gramsci membagi tiga tingkatan hegemoni yaitu, hegemoni total (integral), hegemoni yang merosot (*decadent*), dan hegemoni minimum. Pertama, hegemoni total ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Kedua, hegemoni yang merosot. Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomis borjuis menghadapi tantangan berat. Ketiga, hegemoni minimum. Bentuk ini adalah bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk di atas.

Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan khas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan "negara baru" yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonis itu (Patria & Arief, 2015: 115).

Dalam menampilkan seni pertunjukan Gandrung di Banyuwangi ini, posisi hegemoni dalam perspektif Gramsci adalah hegemoni total. Hegemoni total ditandai dengan hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Antara rezim penguasa dengan subjek "Gandrung itu sendiri" dan masyarakat Banyuwangi.

Pisau bedah kajian ini dianggap tepat menggunakan perspektif hegemoni dari Gramsci karena dalam perspektif hegemoni tidak memosisikan hegemoni sebagai *civil society*, namun memosisikan pada *state (political society)*, dan mengaplikasikan fungsi hegemoni itu sendiri. Pemahaman Gramsci terkait hegemoni menjadi sarana kultural ataupun [ideologis](#), tempat kelompok yang dominan dalam masyarakat/[kelas eksklusif](#) penguasa. Gramsci menumbuh kembangkan dominasi tersebut dengan mengamankan 'persetujuan spontan' kelas-kelas subordinat termasuk [kelas pekerja](#), melalui negoisasi konsensus politik ataupun ideologis yang menembus dalam kelas-kelas dominan ataupun yang didominasi.

Politisasi Gandrung sebenarnya menunjukkan bahwa beroperasinya kekuasaan hegemoni melalui kegiatan budaya dan pariwisata sebagai salah satu mekanisme ekonomi dan politik berjalan efektif, terutama dalam mencapai konsensus politis. Walaupun beberapa kelompok kesenian rakyat tradisional seperti kelompok Gandrung harus bekerja keras untuk bernegosiasi menggunakan budaya di Banyuwangi pasca reformasi, karena tidak adanya proyek pencerahan untuk mengembangkan dan memberdayakan keberadaannya. Tidak ada tokoh atau lembaga budaya di Banyuwangi yang bersuara serius. Ini menandakan bahwa, mereka dihegemoni oleh kekuasaan/pemerintah karena mereka mengemban keuntungan finansial dan mengidealkan pengembangan budaya Gandrung melalui Festival di Banyuwangi.

## METODE

Bentuk penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, kalimat, dan gambar. Peneliti memfokuskan pada catatan yang memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya untuk menunjang penyajian data. Lokasi penelitian ini ada di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dinilai tepat guna dikarenakan Banyuwangi merupakan kota Gandrung sebagai identitas daerah.

Sumber data primer utama dalam penelitian ini yaitu informan. Informan yang dipilih merupakan orang yang benar-benar mempunyai kredibilitas mengenai Gandrung, yang terdiri atas pelaku/penari gandrung, budayawan, komunitas budaya pelestari gandrung, politikus, birokrat daerah/pemda, dan sesepuh adat. Sumber data sekundernya adalah buku-buku referensi tentang Gandrung, serta jurnal sebagai sumber acuan dan data pembandingan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatory. Peneliti akan secara langsung terlibat dalam studi lapangan di lingkungan. Jadi, peneliti sekaligus sebagai human instrument dalam pengamatan berperan serta dengan tujuan untuk mendapatkan data selengkap mungkin dan mengetahui makna budaya pada data yang sebenarnya. Di lain sisi, peneliti menggunakan metode pengamatan tertutup. Hal ini mengingat bahwa, peneliti mengamati perilaku budaya khusus, seperti masalah sosial politis, magis, dan ritual sakral (Endraswara, 2003). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan konten analisis. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan analisis interaktif. Analisis interaktif dibangun oleh tiga unsur pokok yakni, reduksi data, sajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Temuan

Kesenian Gandrung adalah tari yang memiliki kekhasan tersendiri dan asli dari Banyuwangi. Gandrung sebagai seni difungsikan sebagai alat komunikasi politik. Gandrung sebagai karya seni dipelajari sebagai sistem visual, karya seni Gandrung juga merupakan simbol masyarakat Banyuwangi. Namun, memahami karya seni tidak hanya sebagai simbol masyarakat Banyuwangi,



tetapi hasil yang terlihat dari proses produksi budaya yang ditempatkan dalam praktik sosial (Gibson, 2009:25). Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat Banyuwangi menggandrungi Gandrung. Kreativitas yang tinggi dari masyarakat Banyuwangi dalam kesenian rakyat, disadari benar oleh berbagai pihak. Hal itu menjadi celah bagi aktor-aktor politik di Banyuwangi, untuk menyelipkan pesan-pesan politik pada pertunjukan kesenian Gandrung. Dengan demikian, pesan-pesan politik tersebut dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, meskipun dengan kesan terselubung.

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap alasan mengapa gandrung dijadikan sebagai media komunikasi politik oleh para aktor, diantaranya:

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat, dalam pertunjukan gandrung, penonton sering kali diajak berpartisipasi dalam menari atau menyanyi bersama. Dengan demikian, gandrung sebagai media komunikasi politik dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, membangun hubungan yang lebih dekat antara politisi dan rakyat, serta memperkuat dukungan politik.
2. Menciptakan citra dan identitas politik, dengan menggunakan gandrung, politisi dapat menciptakan citra dan identitas politik yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini dapat membantu memperkuat daya tarik politisi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Pemerintah Daerah Banyuwangi aktif sekali membantu pengembangan Gandrung, baik dengan jalan menyediakan dana, maupun fasilitas yang diperlukan, antara lain dengan cara menyajikan Gandrung dalam rangka acara resmi sewaktu malam kesenian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Semula pertunjukan Gandrung diselenggarakan di lapangan terbuka, namun setelah Orba Gandrung dipentaskan di pendopo, aula, dan panggung-panggung kesenian yang disaksikan oleh para pejabat tinggi. Untuk lebih menggalakkan pengembangan Gandrung, Pemerintah Daerah Banyuwangi pada pertengahan tahun 1974, mensponsori penyelenggaraan festival Gandrung dengan mengerahkan seluruh potensi Gandrung se-Kabupaten Banyuwangi.

Cara-cara yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi kala itu, ternyata berhasil mencapai sasarannya. Mereka telah berhasil mengambil hati masyarakat dengan menggunakan alat kesenian Gandrung. Kini, seluruh lapisan masyarakat mulai dari desa yang pelosok hingga masyarakat kota, generasi mudanya memberikan penghargaan (apresiasi) tinggi terhadap Gandrung yang merupakan kesenian rakyat warisan leluhur Blambangan yang mengandung nilai estetik cemerlang sepanjang masa.

## **DISKUSI**

Komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang mengandung pesan-pesan bernilai politik yang merupakan akibat aktual dan potensial dari perilaku manusia dalam keadaan pertentangan atau konflik. Gandrung dijadikan sebagai media komunikasi politik oleh para aktor politik untuk menjembatani maksud dan pesan-pesan politik dari para penguasa ini agar tersampaikan kepada masyarakat luas. Pementasan Gandrung yang kentara isu politiknya apabila digandeng oleh partai politik saat pemilu. Jika sudah mendekati masa pemilihan, maka aktor-aktor politik gencar sekali mendekati kesenian yang sedang diminati, dijunjung, dan dilestarikan oleh masyarakat yaitu Gandrung.

Pementasan Gandrung yang sedang digandeng oleh para aktor politik akan kentara simbol-simbol yang ingin ditonjolkannya. Simbol tersebut bisa berkaitan dengan isu-isu politik dan warna. Biasanya pementasan Gandrung diselipkan informasi-informasi (isu politik) mengenai visi-misi ke depan rezim negara, dengan tujuan agar mudah ditangkap oleh masyarakat. Berikut juga diikuti oleh adanya 'pesanan' separangkat tata busana Gandrung. Jika yang 'memesan' ataupun yang akan menyelipkan isu politiknya, maka separangkat tata busana Gandrungnya juga menyesuaikan warna dari partai tersebut.



Gambar 1. tata busana Gandrung yang berkaitan dengan simbol politik yang berupa warna.

Pendekatan yang dilakukan oleh para aktor politik kepada Gandrung juga menimbulkan terbentuknya citra positif yang dibangun untuk ditampilkan kepada masyarakat luas. Timbul citra aktor politik tersebut melestarikan budaya, peduli akan budaya, dan sangat dekat dengan masyarakat dikarenakan Gandrung sebagai hiburan bagi masyarakat, apabila aktor politik dapat memfasilitasi Gandrung, maka membentuk citra bahwa ia mengutamakan kepentingan rakyat dan berusaha dekat dengan masyarakat. Hal ini menurut Shahid, Hassan, dan Sadaf (2021) adalah tentang penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh aktor politik dalam kapasitasnya untuk membangun/mempertahankan kesan, persepsi, dan asosiasi tertentu yang koheren tentang citra dalam pikiran pemilih target, melalui komunikasi yang jelas dan konsisten. Citra diri mewakili pendapat, pernyataan, dan keyakinan tokoh dan kandidat.

Menyusun citra kandidat/politisi dibenak masyarakat bergantung pada strategi manajemen politik dan pengetahuannya, serta seluk-beluk dan dinamika psikologis yang terkait dengan konstruksi citra pada tingkat individu (Garzia 2013; Harlow 2018). Terbentuknya citra positif pada kandidat aktor politik, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan kandidat/politisi untuk mengubah kata-kata dan tindakan mereka menjadi harapan, aspirasi, dan impian masyarakat Banyuwangi (Cwalina dan Falkowski, 2015; Newman 1999a). Kepribadian mereka dan isu yang mereka soroti, memainkan peran penting dalam mengembangkan citra positif bagi mereka (Garzia 2013).

Gandrung adalah representasi Banyuwangi. Dibuktikan dengan busana Gandrung yang memiliki makna penggambaran situasi dan kondisi Banyuwangi. Hal ini menandakan tari Gandrung sebagai alat komunikasi kepada masyarakat Banyuwangi. Gandrung adalah sebuah seni tari tradisional Banyuwangi. Kesenian adalah alat yang ampuh untuk menarik perhatian, menghimpun, dan mempengaruhi massa. Hal tersebut sejalan dengan paham Gandrung menjadi simbol komunikasi politik melalui kebudayaan. Menurut (Purwasito, 2015) apapun yang digunakan, dapat dikonsumsi dan dikerjakan, benda apapun yang diproduksi, adalah penanda komunikasi. Proses komunikasi berada dalam sistem simbolis. Jadi, Gandrung sebagai media kampanye adalah bentuk komunikasi politik. Gandrung memiliki penampilan yang mempesona dan sebagai media komunikasi politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah daerah juga memasukkan Gandrung sebagai strategi untuk membentuk budaya dominan yang unik sebagai ikon daerah.

Hal ini sejalan dengan teori hegemoni Gramsci yang menyatakan bahwa suatu kelas tidak dapat meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri, karenanya mereka harus juga memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yaitu kepentingan yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi. Dengan demikian, hegemoni mempunyai dimensi kelas dan dimensi nasional kerakyatan. Kesenian Gandrung sangat digandrungi dan sangat dielu-elukan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Gandrung juga memiliki nilai historis yang tinggi, dikarenakan menggambarkan perjuangan rakyat melawan penjajah sejak dahulu. Fungsi Gandrung bagi masyarakat adalah sebagai hiburan. Namun, rezim penguasa memiliki kepentingan lain daripada itu, sehingga rezim penguasa mendukung Gandrung dengan *nguri-nguri* kebudayaan dengan melestarikan kesenian Gandrung di Banyuwangi.

Pada tahun 1960, ketika perdebatan antarpolitis sangat ramai dan meluas, Gandrung diperebutkan terutama oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), dan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) milik Partai Nasional Indonesia (PNI). Akhirnya, Gandrung dimanfaatkan oleh LEKRA dan LKN sebagai alat komunikasi kepada masyarakat di Banyuwangi untuk terus memobilisasi pendukungnya masing-masing. Selain itu, partai membutuhkan dukungan praktis seperti pemilu dan yang sedang tren di partai politik saat ini. Hal tersebut dimanfaatkan oleh LEKRA untuk mengandeng kesenian Gandrung untuk mempermudah jalan menuju tujuan parpolnya. LEKRA mengharuskan Gandrung sebagai subjek untuk teratur menyanyikan lagu-lagu yang seharusnya menjadi ciri khasnya yaitu Genjer-genjer. Karena itu, Gandrung diidentikkan sebagai LEKRA (komunis). Sejak peristiwa 1965, gandrung dilarang pentas, bahkan lagu-lagunya pun dilarang didengar dan tariannya dilarang ditarikan kembali. Kurang lebih enam tahun setelah kejadian tersebut, pentas Gandrung tidak terlihat lagi di Banyuwangi.

Sejalan dengan teori komunikasi politik, yang merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk memodifikasi pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan tindakan publik berkaitan oleh isu-isu politik (Swanson & Nimmo, 1990:9; Ispandriano, 2014:13). Gandrung dimodifikasi dengan sedemikian rupa, diwajibkan menyanyi lagu Genjer-genjer yang menjadi ciri khas komunis, hal tersebut bertujuan untuk memperlancar isu-isu politik yang diusung oleh PKI. Pola komunikasi politik terjadi secara *top-down* hingga *bottom-up*. Maksud dari *top-down* adalah dimulai dari struktur-struktur politik dari rakyat. Lalu *bottom-up*, maksudnya ialah dari masyarakat untuk elit politik, terlebih-lebih dengan hadirnya media baru saat ini. Tujuan dari ini semua yaitu untuk mempengaruhi proses dan kebijakan politik pada lembaga-lembaga politik yang ada. Gandrung yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ini, menjadi celah untuk dimanfaatkan bagi PKI untuk mempengaruhi proses dan kebijakan politik untuk segera mencapai tujuannya. Akhirnya, Gandrung terseret dan terkena batunya dalam peristiwa G30S/PKI.

Dalam kurun waktu enam tahun vakum, Gandrung merubah tatanan pementasannya supaya dapat diterima oleh masyarakat kembali. Seperti halnya memasukkan lagu-lagu yang bernuansa Islami agar diterima dalam kalangan agamawan. Orientasi Gandrung saat ini lebih mengarah kepada hiburan, yang lebih banyak untuk undangan acara pemilihan partai, keadaan inilah yang kemudian bertambah kuat pada masa orde baru. Gandrung menjadi bagian dari geliat seni, budaya, dan politik nasional.

Pada periode berikutnya, Gandrung kembali digunakan sebagai alat propaganda politik dan sebagai bagian dari program sosialisasi layanan informasi. Terakhir, tentunya menjadi bagian dari program pariwisata pemerintah, sebagian besar merupakan kelanjutan dari orde baru. Era berikutnya, dengan legitimasi politik yang kuat dari pemerintah, terasa semangat pembangunan yang membuat banyak orang beranggapan bahwa keadaan saat ini tidak kondusif bagi perkembangan seni karena keterbatasannya. Seni pertunjukan sering disematkan dalam pesan politik pemerintah dan banyak digunakan untuk tujuan pariwisata, yang pada saat itu merupakan bagian dari program pembangunan pemerintah. Pada saat itu, pertunjukan Gandrung banyak memuat informasi politik, seperti informasi tentang perkembangan atau rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa, kesenian Gandrung sebagai alat komunikasi politik. Tujuan kesenian Gandrung digunakan sebagai informan mengenai rencana pemerintah terhadap masyarakat luas adalah untuk perekonomian. Hal ini sejalan dengan teori Gramsci, dalam membicarakan hegemoni memberikan tiga batasan konseptualisasi, yaitu ekonomi, masyarakat politik (*political society*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Ekonomi, adalah batasan yang digunakan untuk mengartikan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat.

Era 1970-an juga mencatat bagaimana "rezim Pendopo" (pemerintah kabupaten Banyuwangi) mulai mensponsori banyak kegiatan kultural untuk mempromosikan keunikan dan kemegahan kebudayaan Osing sebagai ikon khusus Banyuwangi. Hal ini juga berkaitan dengan usaha rezim negara untuk memopulerkan budaya nasional sebagai puncak dari kebudayaan daerah. Namun, kebudayaan daerah sebenarnya hanya menjadi filter dari mulai berseminya paham



kebebasan, sebagai akibat berkembangnya modernitas yang dibawa pembangunan nasional. Pengembangan budaya daerah lebih diarahkan kepada perayaan estetik sekaligus penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini membuktikan bahwa kesenian Gandrung jika dikaji menggunakan teori Gramsci menunjukkan bahwa Gandrung terhegemoni secara total. Hegemoni total (integral), ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati total. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh, yang tampak dari hubungan organis pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis.

Samsul Hadi merupakan bupati yang berhasil melakukan "kulturalisasi politik," yakni memainkan persoalan politik dan pemerintahan dengan simbol-simbol ke-Osingan. Selain itu, ia juga menjalankan "politikasi kultural," yakni menggunakan simbol-simbol ke-Osingan sebagai kekuatan untuk meraih dukungan publik. Hal ini membuktikan bahwa, Samsul Hadi membuat tarian Gandrung sebagai produk budaya Osing menjadi sebuah alat untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat akan kepentingan politiknya. Dalam kerangka demikianlah, mobilisasi identitas Using dimainkan oleh rezim penguasa. Di satu sisi, kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar budayawan dan pelaku seni karena merasa mendapatkan pengayom bagi keberlangsungan identitas Osing, apalagi Samsul terkenal royal, suka memberi uang kepada mereka. Hal-hal tersebut yang membuat Gramsci menyadari bahwa, hegemoni kaum borjuis tidak semata-mata berdasarkan dayaancam ekonomis dan politiknya, tetapi karena kaum borjuis mampu menciptakan alam pikiran dan sistem nilai yang diyakini oleh masyarakat. Samsul Hadi berhasil mengambil hati masyarakat, sehingga membuat mereka tidak merasa terancam, melainkan merasa mendapatkan pengayom. Kaum pekerja dan kaum tertindas mau menerima hegemoni kaum borjuis karena mereka menganggapnya wajar dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya given. Ciri khas kekuasaan hegemoni adalah bahwa kekuasaan itu tertanam dalam keyakinan, cita-cita, dan pandangan normatif seluruh masyarakat.

Littlejohn (2009) menjabarkan bahwa, ada level (tingkatan) dalam komunikasi yaitu, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Tari Gandrung ini termasuk komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu komunikasi yang lebih kompleks. Komunikasi ini mengandung berbagai hubungan antara lain: hubungan antarpersonal, kelompok, dan organisasi. Pada komunikasi tersebut melibatkan ranah publik. Kesenian Gandrung terdapat komunikasi antarpemirsa, antara Gandrung dengan komunitas, antara Gandrung dengan masyarakat, dan antara Gandrung dengan pemesannya/ yang mengundangnya (biasanya aktor politik) yang ada di Banyuwangi. Komunikasi memiliki lima elemen penting yaitu, komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikatornya adalah pemirsa Gandrung sendiri, pesannya berupa isu-isu politik yang sedang berkembang, dibuktikan dengan busana Gandrung dalam masa-masa pemilu akan mengikuti ciri khas parpol yang memesannya, lagu-lagu dan syair yang digunakan juga mengikuti kepentingan si pemesan. Lalu media yang digunakan Gandrung sendiri adalah tarian Gandrung yang menjadi ciri khas Banyuwangi dan digandrungi oleh masyarakat Banyuwangi yang berkaitan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Komunikannya berupa masyarakat, kaitannya dengan komunikasi antara Gandrung dengan masyarakat. Selanjutnya, efeknya adalah menjadikan masyarakat mengikuti apa-apa yang telah dibentuk dan ditentukan oleh pemerintah. Hal ini adalah suatu celah bagi pemerintah untuk menggandeng Gandrung sebagai alat untuk menyampaikan tujuan-tujuan politiknya.

Titik utama pemahaman Gramsci adalah bagaimana usaha mendapatkan hegemoni kultural dan politik. Apabila kelompok sosial menjadikan kekuatan yang mengonfrontasikan dan mengarahkan semua kelompok sosial lainnya, maka hegemoni tersebut akan tercapai. Terbukti bahwasannya partai politik merupakan hal yang krusial ketika kelompok-kelompok menginginkan hegemoni. Dalam kaitannya dengan persoalan hegemoni, partai menjadi fungsi untuk mengkoordinir sebuah kelompok sosial yang progresif dan fundamental untuk mendapatkan hegemoni kultural dan politik. Pemikiran Gramsci membukakan kesadaran tentang gerakan pekerja sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (*civil society*) dan sebaliknya. Menurut Gramsci, kelas pekerja hanya bisa menjadi kelas hegemonik dengan cara memperhatikan berbagai kepentingan dari kelas dan

kekuatan sosial lain, serta mempertemukannya dengan kepentingan mereka sendiri. Kepentingan tersebut tidak boleh sebatas kepentingan lokal yang disebut Gramsci sebagai perjuangan ekonomi korporasi (*economic corporate struggle*). Mereka juga harus mencapai berbagai konsensus agar bisa mewakili semua kelompok kekuatan yang lebih besar. Upaya mencapai konsensus dilakukan melalui perjuangan politik dan kepemimpinan intelektual, serta penyadaran ideologi melalui pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Perjuangan politik tersebut diraih menggunakan alat komunikasi yang berupa kesenian Gandrung untuk mewakili semua kelompok/lapisan masyarakat. Tujuan menciptakan hegemoni baru hanya dapat diraih dengan mengubah kesadaran, pola pikir, pemahaman dan konsepsi masyarakat tentang dunia, serta mengubah norma perilaku moral mereka.

Politisasi Gandrung sebenarnya menunjukkan bahwa, beroperasinya kekuasaan hegemoni melalui kegiatan budaya dan pariwisata sebagai salah satu mekanisme ekonomi dan politik berjalan efektif, terutama dalam mencapai konsensus politis. Walaupun beberapa kelompok kesenian rakyat tradisional seperti kelompok Gandrung harus bekerja keras untuk bernegosiasi menggunakan budaya di Banyuwangi pasca reformasi, karena tidak adanya proyek pencerahan untuk mengembangkan dan memberdayakan keberadaannya. Tidak ada tokoh atau lembaga budaya di Banyuwangi yang bersuara serius. Ini menandakan bahwa, mereka dihegemoni oleh kekuasaan/pemerintah karena mereka mengemban keuntungan finansial dan mengidealkan pengembangan budaya Gandrung melalui Festival di Banyuwangi.

Strategi dari rezim negara tersebut mengancam dengan keleluasaan minimal untuk kinerja budaya (Powell, 2011). Pada intinya, bersama dengan diktum hegemonik, kepentingan pribadi ekonomi dan oportunisme dari rezim negara adalah mesin yang menggerakkan pertunjukan budaya Gandrung. Itu bukan untuk mengatakan bahwa banyak penari Gandrung tidak terlibat dalam altruisme dan filantropi yang dilakukan oleh rezim negara, tetapi menghasilkan sumber daya ekonomi adalah predikatnya. Tertutup dari sistem sosial ekonomi yang mendevaluasi sumber daya mereka, subkultur yang terpinggirkan menciptakan dunia sosial ekonomi dan sosial budaya mereka sendiri.

Bukti terbaru yang ditemukan oleh peneliti adalah saat Ganjar ke Banyuwangi pada Sabtu, 8 Oktober 2022. Sahabat Ganjar menggelar gebyar seni tari Gandrung untuk Ganjar Pranowo sebagai wujud melestarikan budaya lokal. Deklarasi tari Gandrung untuk Ganjar Pranowo adalah bukti otentik Ganjar menggandeng kesenian yang saat ini sedang digandrungi oleh masyarakat untuk pemilu Presiden 2024. Ganjar memulainya dari Banyuwangi dan menggandeng Gandrung sebagai alat propaganda politiknya. Di sini Gandrung sebagai alat komunikasi politik Ganjar yang bertujuan untuk menggaet suara masyarakat dengan aspek melestarikan budaya lokal.



Gambar 2. Relawan Sahabat Ganjar di Banyuwangi mendeklarasikan tari Gandrung untuk Ganjar Pranowo.

Sumber: Instagram @bwi24jam

## KESIMPULAN

Gandrung sebagai seni difungsikan sebagai alat komunikasi politik. Kreatifitas yang tinggi dari masyarakat Banyuwangi dalam kesenian rakyat, disadari benar oleh aktor-aktor politik di Banyuwangi. Hal itu menjadi celah bagi aktor-aktor politik di Banyuwangi, untuk menyelipkan pesan-pesan politik pada pertunjukan kesenian Gandrung. Dengan demikian, pesan-pesan politik tersebut dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Hal itu ditandai dengan simbol yang merujuk pada

sebuah parpol yang 'memesan' pementasan Gandrung tersebut. Dengan menggunakan gandrung sebagai media komunikasi politik, para politisi dapat terlibat secara langsung dengan masyarakat dan menarik perhatian mereka melalui simbolisme budaya yang sudah dikenal dan dihargai.

Hal ini sejalan dengan teori Gramsci, dalam membicarakan hegemoni memberikan tiga batasan konseptualisasi, yaitu ekonomi, masyarakat politik (*political society*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Ekonomi, adalah batasan yang digunakan untuk mengartikan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Kesenian Gandrung jika dikaji menggunakan teori Gramsci menunjukkan bahwa Gandrung terhegemoni secara total. Hegemoni total (integral), ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati total. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh, yang tampak dari hubungan organis pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis. Politisasi Gandrung sebenarnya menunjukkan bahwa beroperasinya kekuasaan hegemoni melalui kegiatan budaya dan pariwisata sebagai salah satu mekanisme ekonomi dan politik berjalan efektif, terutama dalam mencapai konsensus politis.

Hal ini sejalan dengan konsep hegemoni Gramsci terhadap kebudayaan, dimana Gramsci melihat budaya sebagai salah satu alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya. Kelompok yang berkuasa menggunakan kekuasaan politik dan ekonomi mereka untuk mempengaruhi budaya dan menciptakan persetujuan kolektif di antara kelompok yang didominasi.

Apa yang dilakukan oleh aktor politik dengan memanfaatkan gandrung sebagai alat politik melalui kebudayaan, dalam pandangan Gramsci menggambarkan hegemoni sebagai bentuk dominasi yang tidak hanya didasarkan pada kekuatan fisik atau paksaan, tetapi juga pada penerimaan sukarela dari kelompok yang didominasi. Hegemoni tercapai ketika kelompok yang berkuasa berhasil mengesahkan dan memperoleh dukungan luas terhadap norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan mereka, sehingga menciptakan konsensus sosial dalam masyarakat.

Walaupun beberapa kelompok kesenian rakyat tradisional seperti kelompok Gandrung harus bekerja keras untuk bernegosiasi menggunakan budaya di Banyuwangi pasca reformasi, karena tidak adanya proyek pencerahan untuk mengembangkan dan memberdayakan keberadaannya. Ini menandakan bahwa, mereka dihegemoni oleh kekuasaan/pemerintah karena mereka mengemban keuntungan finansial dan mengidealkan pengembangan budaya Gandrung melalui Festival di Banyuwangi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anoegrajekti, Novi, Sariono, A., Macaryus, S., & Kusumah, M. S. 2018. "Banyuwangi Ethno Carnival As Visualization Of Tradition: The Policy Of Culture And Tradition Revitalization Through Enhancement Of Innovation And Locality-Based Creative Industry." *Cogent Arts And Humanities*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2018.1502913>
- Cangara, Hafied. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Cahyadi, R. 2019. "Kearifan Lokal Festival Sewu Gandrung Banyuwangi sebagai Penunjang Literasi Budaya." *Prosiding Senasbasa*, 13(1). <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>.
- Cossu, A. 2021. "Clifford Geertz, Intellectual Autonomy, And Interpretive Social Science." *American Journal Of Cultural Sociology*, 9(3). <https://doi.org/10.1057/S41290-019-00085-8>
- Cwalina, W., A. dan Falkowski. 2015. "Political Branding: Political Candidates Positioning Based on Inter-Object Associative Affinity Index." *Journal of Political Marketing*, 14(1-2), DOI: 10.1080/15377857.2014.990842.
- Dariharto. 2009. *Kesenian Gandrung Banyuwangi*. Banyuwangi: Dinas. Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
- Dianto, E. F. 2017. "Isun Hang Gandrung." *Joged*, 8(2). <https://doi.org/10.24821/Joged.V8i2.1596>.

- Garzia, D. 2013. "Can Candidates Image Win Elections? A Counterfactual Assesment of Leader Effects in the Second Italian Republic." *Journal of Political Marketing*, 12(4), DOI: 10.1080/15377857.2013.837303.
- Gibson, N.J. 2009. "Making Art, Making Identity: Moving beyond Racialised Perceptions of Identity through Collaborative Exhibition in the New South Africa." *South African Historical Journal*, 61(3). DOI: 10.1080/02582470903189790.
- Harlow, R. M. 2018. "Impression Management." *The International Encyclopedia of Strategic Communication*, 1(5), DOI: 10.1002/9781119010722.iesc0086.
- Hendarto, Heru. 1993. *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci: dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia.
- Ispandriarno, Lukas S. 2014. "Analisis Media dan Perempuan." *Artikel Surat Kabar*. 1(1). <http://ejournal.uajy.ac.id/4913/>
- KP Desantara. 2007. *Srintil 11: Penari Gandrung dan Gerak Sosial Gandrung Banyuwangi*. Indonesia: Desantara.
- Latifa, A. 2020. "From Gandrung Statue to the Gandrung Sewu: Approaching Two Decades of Cultural Policy in Banyuwangi (2000-2019)." *Talent Development Nad Excellence*, 12(2a). <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/96989/F.%201B>.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi, edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mursidi, A. 2018. "Gandrung Seni Pertunjukan di Banyuwangi." *Jurnal Santhet*, 2(1), E-ISSN: 2541-6130, P-ISSN 2541-2523, PP 10-17.
- Newman, B. I. 1999a. "A Predicative Model of Voter Behavior: The Repositioning of Bill Clinton." *Handbook of Political Marketing*, 259(82).
- Pakarti, D., Kebayantini, N. L. N., & Krisna Aditya, I. G. N. A. 2020. "Relasi Kuasa dalam Perubahan Seni Tari Gandrung di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot)*, 1(1).
- Panjaitan, F., & Siburian, H. 2020. "Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan." *Logia*, 1(1). <https://doi.org/10.37731/Loq.V1i1.19>
- Patria, A.N dan Arief. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Budiman.
- Powell, V. 2011. "A Social Identity Framework of American Hip-Hop Cultural Performance." *Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation, and Culture*, 17(4). DOI: 10.1080/13504630.2011.587302.
- Prasetyo, M. 2018. "Omprok Gandrung Banyuwangi." *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, 7(2). <https://doi.org/10.23887/Jjpsp.V7i1.13630>
- Purwasito, Andrik. 2015. *Komunikasi Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Bahagio. 2016. "Dinamika Kesenian Gandrung di Banyuwangi 1950-2013." *Jurnal Humanis, Fakultas Sastra dan Budaya Unud*, 15 (2). <https://doi.org/10.21328-1-41366-1-10-20160620>.
- Shahid, M.N, Hassan, W, dan Sadar, L. 2021. "Exploring the Political Co-Brand Image & Positioning from External Stakeholder's Perspective in Pakistan." *Journal of Political Marketing* DOI: 10.1080/15377857.2021.1930328.
- Srinthil. 2007. *Media Perempuan Multikultural Edisi 12: Penari Gandrung dan Gerak Sosial di Banyuwangi*. Depok: Desantara.
- Subari, L., & Widiyanto, S. 2020. "Peran Ritual Meras Gandrung di Banyuwangi dalam Membentuk Kualitas Kepenarian." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.22219/Satwika.V4i2.13633>
- Swanson & Nimmo. 1990. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remadja Karya W.
- Tekman, HG, & Hortac, su, N. (2002). Musik dan identitas sosial: Identifikasi gaya sebagai tanggapan terhadap gaya musik. *Jurnal Psikologi Internasional*, 37(5), 277285.
- Wolbers, P. A. 2014. "Gandrung and Angklung from Banyuwangi: Remnants of a Past Shared with Bali." *Asian Music*, 18(1). <http://www.istor.org/stable/834159>.